



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 47 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perubahan struktur organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2011 dan dinamika perubahan lingkungan strategis serta kebijakan aktual di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tahun 2010-2014 sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;

- c. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tidak sesuai lagi dengan perubahan peran, tugas dan fungsi organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi .
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini, merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) untuk :

- a. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB Tahun 2010 – 2014.

Pasal 2

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pasal 3

Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas :

- a. *reviu* atas capaian kinerja setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka memastikan keandalan dan keakuratan informasi dalam hasil monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja;
- b. evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ~~24~~ 24 Oktober 2011

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,**



AZWAR ABUBAKAR

- I.
1. Nama Organisasi : **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**
 2. Tugas : menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
 3. Fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
 - c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PAN dan RB; dan
 - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PAN dan RB

4. **Indikator Kinerja Utama Kementerian**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjabaran	Program
I.	Terwujudnya kualitas pelayanan publik prima, cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan	Persentase instansi yang skor IKM baik	Formulasi Penghitungan: (Jumlah Instansi yang skor IKM baik) / (Jumlah Instansi yang memiliki IKM) x 100% ; Tipe Penghitungan: Kumulatif ; Sumber data: Laporan hasil penilaian pelayanan publik Deputi Bidang Pelayanan Publik	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Pelayanan Publik
		Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Formulasi Penghitungan : (Jumlah Pemda yang telah menerapkan PTSP) / (Jumlah Pemda) x 100% ; Tipe Penghitungan: kumulatif ; Sumber data: Laporan hasil penilaian pelayanan publik Deputi pelayanan publik	
		Persentase Instansi/Unit Pelayanan yang berkategori baik sesuai penilaian	Formulasi Penghitungan: (Jumlah instansi/unit pelayanan yang berkategori baik) / (Jumlah Instansi/unit pelayanan yang dinilai) x 100% ; Tipe Penghitungan: Kumulatif ; Sumber data: Laporan hasil penilaian pelayanan publik Deputi Bidang Pelayanan Publik	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pengukuran	Program
II.	Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien	Persentase Kementerian/ Lembaga yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga yang struktur organisasi dan tata kerjanya telah tertata berdasarkan evaluasi kelembagaan) / (Jumlah Kementerian / Lembaga) x 100%; • Tipe Penghitungan : Kumulatif; • Sumber data : Deputi Bidang Kelembagaan	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Kelembagaan
		Persentase kelembagaan Pemda yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	• Formulasi Penghitungan : Jumlah Pemerintah Daerah yang telah dipantau dan dievaluasi organisasi dan tata kerjanya; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif ; • Sumber data : Deputi Bidang Kelembagaan	
III.	Terwujudnya SDM Aparatur yang profesional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera	Persentase peningkatan penghasilan PNS sesuai kebijakan nasional	• Formulasi Penghitungan: Persentase kenaikan gaji PNS per tahun yang ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Presiden ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Deputi Bidang SDM Aparatur	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang SDM Aparatur
		Jumlah instansi pemerintah yang menyusun perencanaan kebutuhan SDM aparatur dan sesuai aturan	• Formulasi Penghitungan: Jumlah instansi pemerintah yang telah menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dan penataan PNS sesuai ketentuan • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif ; • Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang SDM Aparatur	

Lampiran 1
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor ~~47~~ Tahun 2011
 Tanggal ~~24~~ Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
		Persentase instansi yang menegakkan disiplin sesuai aturan	• Formulasi Penghitungan: (Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah disosialisasikan dan menerapkan penegakan disiplin sesuai PP 53/2010) / (Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputy Bidang SDM Aparatur	
		Persentase instansi pemerintah yang melakukan penataan jabatan PNS	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga yang telah melakukan penataan jabatan PNS) / (Jumlah Kementerian/Lembaga) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Deputy Bidang SDM Aparatur	
IV.	Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel	Persentase instansi pemerintah pusat yang melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga yang telah melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik) / (Jumlah Kementerian/Lembaga) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil Evaluasi Deputy Bidang Tata Laksana	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Deputy Bidang Tata Laksana
		Persentase instansi pemerintah daerah yang melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Pemda yang telah melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik) / (Jumlah Total Pemda) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil Evaluasi Deputy Bidang Tata Laksana	

Lampiran 1
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor **47** Tahun 2011
 Tanggal **24** Oktober 2011

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pengjelasan	Program
V.	Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi nasional secara terencana, sistematis, dan komprehensif	Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga yang kualitas pelaksanaan RBnya telah sesuai dengan kebijakan RB Nasional berdasarkan hasil evaluasi)/ (Jumlah Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan program RB) x 100% • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Deputi Bidang Program PAN dan RB	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi
		Jumlah K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional	• Formulasi Penghitungan: Jumlah Kementerian/Lembaga peserta program RB yang telah melaksanakan reformasi birokrasinya sesuai dengan kebijakan RB Nasional berdasarkan hasil evaluasi • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Deputi Bidang Program PAN dan RB	
VI.	Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi	Persentase instansi pemerintah yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah menerapkan SAKIP sesuai aturan /(Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang dievaluasi) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Laporan Hasil Evaluasi AKIP Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas	
		Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang akuntabilitas kinerjanya baik / (jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang dievaluasi) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Laporan Hasil Evaluasi AKIP Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
		Persentase instansi peserta model <i>Island of Integrity</i> yang berhasil	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah Pemda peserta model <i>Island of Integrity</i> yang dinilai berhasil) / (Jumlah instansi pemerintah daerah peserta <i>Island of Integrity</i>) x 100% ; • Tipe Penghitungan: kumulatif ; • Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program <i>Island of Integrity</i> Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas	
VII.	Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah yang terintegrasi, efisien dan efektif	Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah melaksanakan SPI sesuai aturan / (Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas	
		Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti dalam waktu satu tahun	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP pada Kementerian/Lembaga yang telah ditindaklanjuti / (Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP pada Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100%; • Tipe Penghitungan: Kumulatif; • Sumber data : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas	
		Persentase laporan dumas yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang telah disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda) / (Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima Kementerian PAN dan RB) x 100% ; • Tipe Penghitungan : Kumulatif ; • Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas	

Lampiran 1
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor **47** Tahun 2011
 Tanggal **24** Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
		Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang laporan pelaksanaan Inpres percepatan pemberantasan korupsinya telah dievaluasi) / (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda menyampaikan laporan pelaksanaan Inpres percepatan pemberantasan korupsinya) x 100%; • Tipe Penghitungan : Kumulatif ; • Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas	

Lampiran 2
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor **47** Tahun 2011
 Tanggal **24** Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
		3. Jumlah Pemda yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan jumlah Prov/Kab/Kota yang program RB-nya telah disetujui dan telah melaksanakan reformasi birokrasinya sesuai dengan kebijakan RB Nasional berdasarkan hasil evaluasi • Tipe Penghitungan : Non kumulatif • Sumber Data : Laporan hasil evaluasi Deputi bidang Program dan RB	
		4. Tingkat kualitas pelaksanaan RB yang terukur sesuai dengan kebijakan RB Nasional	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga yang kualitas pelaksanaan Rbnya telah sesuai dengan kebijakan RB Nasional berdasarkan hasil evaluasi) / (Jumlah Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan program RB) x 100% • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber Data : Laporan hasil evaluasi Deputi bidang Program dan RB	

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
I.	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan PAN dan Reformasi Birokrasi	1. Jumlah kebijakan pelaksanaan RB yang diterbitkan	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah Peraturan Kebijakan tentang pelaksanaan RB (UU, PP, Perpres, Per. Men. PAN dan RB) yang telah diterbitkan; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif; • Sumber data: Laporan kegiatan Asdep I Pada Deputi Bidang Program dan RB	Pelaksanaan Perumusan Kebijakan PAN dan RB	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Program PAN dan RB
		2. Dokumen isu pokok Program PAN dan RB dalam rangka perumusan rancangan kebijakan	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah Dokumen isu pokok Program PAN dan RB dalam rangka perumusan rancangan kebijakan yang telah diterbitkan; • Tipe Penghitungan: Non komulatif; • Sumber data: Laporan kegiatan Asdep I pada Deputi Bidang Program dan RB		
		3. Sistem informasi kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang Program PAN	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah Sistem informasi kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang Program PAN yang telah disusun dan ditetapkan; • Tipe Penghitngan : Non kumulatif; • Sumber data: Laporan kegiatan Asdep I pada Deputi Bidang Program dan RB		

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
II.	Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan PAN dan RB pada Pemerintah Pusat	1.	Jumlah K/L yang melaksanakan kebijakan Program PAN dan RB sesuai dengan sasaran pembangunan nasional	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah K/L yang telah melaksanakan kebijakan Program PAN dan RB sesuai dengan sasaran pembangunan nasional berdasarkan evaluasi Deputi Program RB • Tipe Penghitungan : Non kumulatif • Sumber data: Laporan kegiatan Asdep II pada Deputi Bidang Program dan RB	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PAN dan RB Pusat	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan kebijakan Program PAN dan RB Pusat
		2	Persentase K/L yang telah menyampaikan usulan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga yang telah menyampaikan usulan reformasi sesuai kebijakan nasional secara formal dan lengkap berdasarkan penilaian Deputi bidang Program dan RB) / (Jumlah Kementerian/Lembaga) x 100% • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber data: Laporan Deputi bidang Program dan RB		
		3	Jumlah K/L yang mengikuti FORTEKPAN	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah K/L yang mengikuti FORTEKPAN setiap tahun; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif; • Sumber data: Laporan kegiatan Asdep II pada Deputi Bidang Program dan RB		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
		4	Persentase instansi yang menerima sosialisasi		
		5	Persentase instansi yang menerima asistensi		
III.	Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan PAN dan RB pada Pemerintah Daerah	1.	Jumlah Pemda yang melaksanakan kebijakan Program PAN dan RB sesuai dengan Sasaran pembangunan nasional	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PAN dan RB Daerah	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan kebijakan Program PAN dan RB Daerah
		2.	Jumlah Pemda yang mengikuti FORKOMPANDA		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
		3. Persentase instansi daerah yang menerima sosialisasi	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Pemda Prov/Kab/Kota yang telah disosialisasi) / (Jumlah Pemda Prov/Kab/Kota) x 100%; • Tipe Penghitungan : kumulatif; • Sumber data: Laporan Kegiatan Asdep III pada Deputi Bidang Program dan RB		
		4. Persentase instansi yang menerima asistensi	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Jumlah Pemda Prov/Kab/Kota yang telah diasistensi) / (Jumlah Pemda Prov/Kab/Kota) x 100%; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif • Sumber data: Laporan Kegiatan Asdep III pada Deputi Program dan RB		
IV.	Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi kebijakan PAN dan RB pada Pemerintah Pusat	1. Pedoman monitoring dan evaluasi PAN dan RB Pusat dan Daerah	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah pedoman monitoring dan evaluasi PAN dan RB Pusat dan Daerah yang telah disusun dan ditetapkan ; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif; • Sumber data : Laporan Kegiatan Asdep IV pada Deputi Bidang Program dan RB	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Pusat	Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Pusat
		2. Jumlah K/L yang dimonitor dan dievaluasi	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah Kementerian/Lembaga yang telah dimonitor dan dievaluasi; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif; • Sumber data : Laporan kegiatan monev Asdep IV pada Deputi Bidang Program dan RB		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
		3.	Prosentase K/L yang diolah sesuai hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim Quality Assurance • Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga yang laporan monitoring dan evaluasi nya oleh Tim <i>Quality Assurance</i> telah diolah) / (Jumlah Kementerian/Lembaga yang dimonitor dan evaluasi oleh Tim <i>Quality Assurance</i>) x100%; • Tipe Penghitungan : Kumulatif ; • Sumber data: Laporan kegiatan monev Asdep IV pada Deputi Bidang Program dan RB		
		4.	Laporan monitoring dan evaluasi Program PAN dan RB Pusat • Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi Program PAN dan RB Pusat yang terbit; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif; • Sumber data : Laporan kegiatan monev Asdep IV pada Deputi Bidang Program dan RB		
V.	Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi kebijakan PAN dan RB pada Pemerintah Daerah	1.	Jumlah provinsi yang dimonitor dan dievaluasi • Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah Provinsi yang telah dimonitor dan dievaluasi. • Tipe Penghitungan : Non kumulatif • Sumber data : Laporan kegiatan monev Asdep V pada Deputi Bidang Program dan RB	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Daerah	Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program PAN dan RB Daerah

Lampiran 2
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor *47* Tahun 2011
 Tanggal *24* Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
		2. Jumlah kabupaten/kota yang dimonitor dan dievaluasi	• Formulasi Penghitungan : Berdasarkan Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dimonitor dan dievaluasi; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif; • Sumber data : Laporan kegiatan monev Asdep V pada Deputi Bidang Program dan RB		
		3. Prosentase Prov/Kab/Kota yang diolah sesuai hasil monitoring dan evaluasi Tim Quality Assurance	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Prov/Kab/Kota yang laporan monitoring dan evaluasinya oleh Tim <i>Quality Assurance</i> telah diolah) / (Jumlah Kementerian/Lembaga yang dimonitor dan evaluasi oleh Tim <i>Quality Assurance</i>) x100%; • Tipe Penghitungan : Kumulatif; • Sumber data: Laporan kegiatan monev Asdep V pada Deputi Bidang Program dan RB		
		4. Laporan monitoring dan evaluasi Program PAN dan RB Pusat	• Formulasi Penghitungan : Berdasarkan Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi Program PAN dan RB Daerah yang terbit; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif ; • Sumber data : Laporan kegiatan monev Asdep V pada Deputi Bidang Program dan RB		

III.

1. Nama unit Organisasi : **Deputi Bidang Kelembagaan**
2. Tugas : menyalurkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan
3. Fungsi :
 - a. penyaluran perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan pemerintahan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. Indikator Kinerja Utama Eselon I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
I.	Terwujudnya organisasi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien	1. Jumlah Peraturan Kebijakan di bidang kelembagaan (UU, PP, Perpres, Per. Men. PAN dan RB)	• Formulasi Penghitungan : Jumlah Peraturan/ Kebijakan di bidang kelembagaan (seperti UU, PP, Perpres, Per. Men. PAN dan RB) yang diterbitkan; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif; • Sumber data : Deputi Bidang Kelembagaan	Deputi Bidang Kelembagaan
		2. Persentase unit organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah unit organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga yang struktur organisasi dan tata kerjanya telah tertata berdasarkan evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target tahunan unit organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga yang akan ditata) x 100%; • Tipe Penghitungan : Kumulatif; • Sumber data : Deputi Bidang Kelembagaan	
		3. Jumlah kelembagaan Pemda yang telah dipantau dan dievaluasi organisasi dan tata kerjanya	• Formulasi Penghitungan : Jumlah Pemerintah Daerah yang telah dipantau dan dievaluasi organisasi dan tata kerjanya; • Tipe Penghitungan : kumulatif; • Sumber data : Deputi Bidang Kelembagaan	

Lampiran 3
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor **47** Tahun 2011
 Tanggal **24** Oktober 2011

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
I	Terwujudnya perumusan kebijakan dan program di bidang kelembagaan yang komprehensif dan tepat sasaran	1. Jumlah Peraturan Kebijakan dibidang kelembagaan (seperti UU, PP, Perpres, Per. Men. PAN dan RB)	• Formulasi Penghitungan : Jumlah Peraturan/Kebijakan di bidang kelembagaan (seperti UU, PP, Perpres, Per. Men. PAN dan RB) yang diterbitkan; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif • Sumber data : Asdep I pada Deputi Bidang Kelembagaan	Pengembangan Kebijakan dan Evaluasi Program Kelembagaan	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kelembagaan
		2. Persentase penyelesaian konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas Kementerian PAN dan RB, BKN dan LAN	• Formula Penghitungan: (Jumlah tahapan hasil konsolidasi yang telah diselesaikan) / (Jumlah tahapan konsolidasi yang harus diselesaikan) x 100% ; • Tipe penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Asdep I pada Deputi Bidang Kelembagaan		
		3. Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan PPK-BLU yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Organisasi Instansi Pemerintah yang telah menerapkan PPK-BLU yang struktur organisasi dan tata kerjanya telah tertata sesuai dengan peraturan berdasarkan evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target tahunan Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU yang akan ditata) x 100%; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Asdep I pada Deputi Bidang Kelembagaan		

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
		4	Persentase LNS yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah organisasi LNS yang struktur organisasi dan tata kerjanya telah tertata sesuai dengan peraturan berdasarkan evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target tahunan organisasi LNS yang akan ditata) x 100 % • Tipe penghitungan : Kumulatif ; • Sumber data: Asdep I pada Deputi Bidang Kelembagaan		
II.	Terwujudnya kelembagaan Polhukam yang proporsional, efektif dan efisien	1.	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan di bidang kelembagaan Polhukam	• Formulasi Penghitungan : Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan di bidang kelembagaan Polhukam ; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif; • Sumber data : Asdep II pada Deputi Bidang Kelembagaan	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam	Asisten Deputi Kelembagaan Politik, Hukum dan Keamanan
		2.	Persentase unit organisasi di lingkungan Kementerian Negara bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah unit organisasi di lingkungan Kementerian Negara bidang Polhukam yang struktur organisasi dan tata kerjanya telah tertata sesuai dengan peraturan berdasarkan evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target tahunan unit organisasi di lingkungan Kementerian Negara Bidang Polhukam yang akan ditata) x 100% • Tipe Penghitungan : Kumulatif ; • Sumber data: Asdep II pada Deputi Bidang Kelembagaan		

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
		3.	Persentase unit kerja di lingkungan LPNK bidang Polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah unit organisasi di lingkungan LPNK bidang Polhukam yang struktur organisasi dan tata kerjanya telah tertata sesuai dengan peraturan berdasarkan evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target tahunan unit organisasi di lingkungan LPNK bidang Polhukam yang akan ditata) x 100% • Tipe Penghitungan : Kumulatif ; • Sumber data: Asdep II pada Deputi Bidang Kelembagaan		
		4.	Persentase organisasi Sekretariat Lembaga Negara yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah organisasi Sekretariat Lembaga Negara yang struktur organisasi dan tata kerjanya telah tertata sesuai dengan peraturan berdasarkan evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target tahunan organisasi Sekretariat Lembaga Negara yang akan ditata) x 100% • Tipe Penghitungan : Kumulatif; • Sumber data: Asdep II pada Deputi Bidang Kelembagaan		
III.	Terwujudnya kelembagaan perekonomian I yang proporsional, efektif dan efisien	1.	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan di bidang kelembagaan Perekonomian I	• Formulasi Penghitungan : Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan di bidang kelembagaan Perekonomian I; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif; • Sumber data : Asdep III pada Deputi Bidang Kelembagaan	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I	Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
		2. Persentase unit organisasi di Lingkungan Kementerian Negara bidang Perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah unit organisasi di lingkungan Kementerian Negara bidang Perekonomian I yang struktur organisasi dan tata kerjanya telah tertata sesuai dengan peraturan berdasarkan evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target tahunan unit organisasi di lingkungan Kementerian Negara Bidang Perekonomian I yang akan ditata) x 100%; • Tipe Penghitungan : Kumulatif; • Sumber data: Asdep III pada Deputi Bidang Kelembagaan		
		3. Persentase unit organisasi di lingkungan LPNK bidang Perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah unit organisasi di lingkungan LPNK bidang Perekonomian I yang struktur organisasi dan tata kerjanya telah tertata sesuai dengan peraturan berdasarkan evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target tahunan unit organisasi di lingkungan LPNK Bidang Perekonomian yang akan ditata) x 100%; • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber data: Asdep III pada Deputi Bidang Kelembagaan		
		4. Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah Lembaga Perwakilan RI bidang Perekonomian yang struktur organisasi dan tata kerjanya telah tertata sesuai dengan peraturan berdasarkan evaluasi kelembagaan) / (Jumlah Lembaga Perwakilan RI Bidang Perekonomian) x 100%;		

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
				• Tipe Penghitungan : Kumulatif ; • Sumber data : Asdep III pada Deputi Bidang Kelembagaan		
IV.	Terwujudnya kelembagaan perekonomian II yang proporsional, efektif dan efisien	1.	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan di bidang kelembagaan Perekonomian II	• Formulasi Penghitungan : Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan di bidang kelembagaan Perekonomian II • Tipe Penghitungan : Non kumulatif; • Sumber data : Asdep IV pada Deputi Bidang Kelembagaan	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II	Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian II
		2.	Persentase unit organisasi di Lingkungan Kementerian Negara bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah unit organisasi di lingkungan Kementerian Negara Bidang Perekonomian II yang struktur organisasi dan tata kerjanya telah tertata sesuai dengan peraturan berdasarkan evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target tahunan unit organisasi di lingkungan Kementerian Negara Bidang Perekonomian II yang akan ditata) x 100% • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber data : Asdep IV pada Deputi Bidang Kelembagaan		
		3.	Persentase unit organisasi di lingkungan LPNK bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah unit organisasi di lingkungan LPNK Bidang Perekonomian II yang struktur organisasi dan tata kerjanya telah tertata sesuai dengan peraturan berdasarkan evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target tahunan unit organisasi di lingkungan LPNK Bidang Perekonomian II yang akan ditata) x 100%		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
			• Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber data: Asdep IV pada Deputi Bidang Kelembagaan		
V.	Terwujudnya kelembagaan kesra yang proporsional, efektif dan efisien	1. Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan di bidang kelembagaan Kesejahteraan Rakyat (Kesra)	• Formulasi Penghitungan : Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan di bidang kelembagaan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) • Tipe Penghitungan : Non kumulatif • Sumber data : Asdep V pada Deputi Bidang Kelembagaan	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat	Asisten Deputi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat
		2. Persentase unit organisasi di Lingkungan Kementerian Negara bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah unit organisasi di lingkungan Kementerian Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang struktur organisasi dan tata kerjanya telah tertata sesuai dengan peraturan berdasarkan evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target tahunan unit organisasi di lingkungan Kementerian Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang akan ditata) x 100% • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber data: Asdep V pada Deputi Bidang Kelembagaan		

Lampiran 3
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor 47 Tahun 2011
 Tanggal 24 Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
		3. Persentase unit organisasi di lingkungan LPNK bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah unit organisasi di lingkungan LPNK Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang struktur organisasi dan tata kerjanya telah tertata sesuai dengan peraturan berdasarkan evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target tahunan unit organisasi di lingkungan LPNK Bidang Kesejahteraan Rakyat yang akan ditata) x 100%; • Tipe Penghitungan : Kumulatif; • Sumber data: Asdep V pada Deputi Bidang Kelembagaan		
		4. Jumlah kelembagaan Pemda yang telah dipantau dan dievaluasi organisasi dan tata kerjanya	• Formulasi Penghitungan : Jumlah Pemerintah Daerah yang telah dipantau dan dievaluasi organisasi dan tata kerjanya; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif; • Sumber data : Asdep V pada Deputi Bidang Kelembagaan		

IV.

1. Nama Unit Organisasi : **Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur**
2. Tugas : menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur
3. Fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang sumber daya manusia aparatur; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. Indikator Kinerja Utama Eselon I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pemeliharaan	Eselon I
I.	Terwujudnya SDM Aparatur yang profesional, berkinerja, akuntabel dan sejahtera	1. Jumlah Peraturan Kebijakan di bidang SDM Aparatur (UU, PP, Perpres, Per. Men. PAN dan RB)	Formulasi Penghitungan : jumlah Peraturan/ Kebijakan di bidang SDM Aparatur (seperti UU, PP, Perpres, Per. Men. PAN dan RB) yang diterbitkan; Tipe Penghitungan : Non kumulatif; Sumber data : Deputi Bidang SDM Aparatur	Deputi Bidang SDM Aparatur
		2. Persentase peningkatan penghasilan PNS berdasarkan hasil analisis dikaitkan dengan tingkat inflasi	Formulasi Penghitungan: Persentase kenaikan gaji PNS per tahun yang ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Presiden ; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Deputi Bidang SDM Aparatur	
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dan penataan PNS sesuai aturan	Formulasi Penghitungan: Jumlah instansi pemerintah yang telah menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dan penataan PNS sesuai ketentuan Tipe Penghitungan: Non Kumulatif ; Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang SDM Aparatur	

Lampiran 4
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor 47 Tahun 2011
 Tanggal 24 Oktober 2011

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pengjelasan	Aselon 1
		4. Persentase instansi yang menegakkan disiplin sesuai aturan	• Formulasi Penghitungan: (Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah disosialisasikan dan menerapkan penegakan disiplin sesuai PP 53/2010) / (Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang SDM Aparatur	
		5. Persentase instansi pemerintah yang melakukan penataan jabatan PNS	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga yang telah melakukan penataan jabatan PNS) / (Jumlah Kementerian/Lembaga) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Deputi Bidang SDM Aparatur	
		6. Jumlah instansi pemerintah yang telah melakukan pemeringkatan jabatan	• Formulasi Penghitungan: Jumlah instansi pemerintah yang telah melakukan pemeringkatan jabatan (evaluasi jabatan); • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang SDM Aparatur	

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Aspek
I.	Meningkatnya hasil perencanaan, evaluasi dan pengelolaan data SDM aparatur	1. Jumlah peraturan/kebijakan dibidang SDM Aparatur	• Formulasi Penghitungan : Jumlah Peraturan /Kebijakan SDM Aparatur yang ditetapkan; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif; • Sumber data: Laporan Asdep I pada Deputi Bidang SDM Aparatur	Pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur	Asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur
		2. Jumlah peraturan/kebijakan dibidang SDM Aparatur yang dikoordinasikan dan dievaluasi dan disempurnakan	• Formulasi Penghitungan : Jumlah Peraturan /Kebijakan SDM Aparatur yang dikoordinasikan dan dievaluasi • Tipe Penghitungan: Non kumulatif; • Sumber data: Laporan Asdep I pada Deputi Bidang SDM Aparatur		
		3. Persentase tingkat Pendataan tenaga honorer (Pendataan Ulang Non PNS)	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah instansi pemerintah yang tenaga honorenya telah selesai terdata) / (Jumlah Instansi pemerintah) x 100%; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif; • Sumber data: Laporan Monev Asdep I pada Deputi Bidang SDM Aparatur		
		4. Persentase tenaga honorer yang telah didata dan dilakukan verifikasi serta validasi	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah tenaga honorer yang telah didata dan dilakukan verifikasi serta validasi) / (Jumlah tenaga honorer) x 100%; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif; • Sumber data: Laporan Monev Asdep I pada Deputi Bidang SDM Aparatur		

Lampiran 4
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor 47 Tahun 2011
 Tanggal 24 Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
		5. Persentase instansi yang melakukan implementasi Sistem Database SDM Aparatur	Formulasi Penghitungan: (Jumlah instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan sistem Database SDM Aparatur) / (Jumlah instansi pemerintah) x 100%; Tipe Penghitungan: Kumulatif; Sumber data: Laporan Monev Asdep I pada Deputi Bidang SDM Aparatur		
		6. Jumlah instansi pemerintah yang telah dievaluasi dalam pelaksanaan kebijakan SDM Aparatur	Formulasi Penghitungan: Jumlah instansi pemerintah yang telah dievaluasi dalam pelaksanaan kebijakan SDM Aparatur Tipe Penghitungan: non Kumulatif; Sumber data: Laporan Monev Asdep I pada Deputi Bidang SDM Aparatur		
II.	Terwujudnya perencanaan dan pengadaan SDM aparatur yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan organisasi	1. Jumlah peraturan/kebijakan dibidang SDM Aparatur	Formulasi Penghitungan : Jumlah Peraturan/Kebijakan SDM Aparatur bidang perencanaan SDM Aparatur yang ditetapkan; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Asdep II pada Deputi Bidang SDM Aparatur	Pengembangan Kebijakan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur	Asisten Deputi Perencanaan SDM Aparatur
		2. Jumlah dokumen penetapan formasi dan laporan hasil evaluasi formasi setiap tahun	Formulasi Penghitungan : Jumlah dokumen penetapan formasi yang telah ditetapkan dan laporan hasil evaluasi formasi; Tipe Penghitungan: Non kumulatif; Sumber data: Laporan Monev Asdep II pada Deputi Bidang SDM Aparatur		

Lampiran 4
Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2011
Tanggal 24 Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon
		3. Persentase instansi pemerintah yang mengirimkan data usulan formasi PNS dan dokumen penghitungan kebutuhan PNS secara akurat dan benar	Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah mengirimkan data usulan formasi PNS dan dokumen penghitungan kebutuhan PNS secara akurat dan benar) / (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Monev Asdep II Deputi SDM Aparatur		
III.	Terwujudnya pengembangan karir SDM aparatur yang fair dan akuntabel	1. Jumlah peraturan/kebijakan dibidang SDM Aparatur	Formulasi Penghitungan : Jumlah Peraturan /Kebijakan SDM Aparatur bidang pengembangan karir SDM Aparatur yang ditetapkan ; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Asdep III pada Deputi Bidang SDM Aparatur	Pengembangan Kebijakan Pemantapan Pengembangan SDM Aparatur	Asisten Deputi Pengembangan SDM Aparatur
		2. Persentase instansi yang menerapkan kebijakan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah menerapkan SKP dalam pengukuran kinerja pegawai) / (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100%; Tipe Penghitungan: Kumulatif ; Sumber data: Laporan Monev Asdep III pada Deputi Bidang SDM Aparatur		
		3. Persentase instansi pemerintah yang melakukan penataan jabatan PNS	Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga yang telah melakukan penataan jabatan PNS) / (Jumlah Kementerian/Lembaga) x 100% ; Tipe Penghitungan: Kumulatif ; Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Deputi Bidang SDM Aparatur		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Asesor II
IV.	Terwujudnya penegakan integritas SDM aparatur yang fair dan akuntabel	1. Jumlah peraturan/kebijakan dibidang SDM Aparatur	Formulasi Penghitungan : Jumlah Peraturan /Kebijakan SDM Aparatur bidang penegakan integritas SDM Aparatur yang ditetapkan ; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Asdep IV pada Deputi Bidang SDM Aparatur	Pengembangan Kebijakan Penegakan Integritas SDM Aparatur	Asisten Deputi Penegakan Integritas SDM Aparatur
		2. Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin PNS	Formulasi Penghitungan: (Jumlah pelanggaran disiplin PNS tahun ini – jumlah pelanggaran disiplin PNS tahun lalu)/ (Jumlah pelanggaran disiplin PNS tahun lalu) x 100% ; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Monev Asdep IV pada Deputi Bidang SDM Aparatur		
V.	Terwujudnya kesejahteraan SDM aparatur yang fair dan akuntabel	1. Jumlah peraturan/kebijakan dibidang SDM Aparatur	Formulasi Penghitungan : Jumlah Peraturan /Kebijakan SDM Aparatur bidang kesejahteraan SDM Aparatur yang diterbitkan ; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Asdep V pada Deputi Bidang SDM Aparatur	Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan SDM Aparatur	Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Aparatur
		2. Jumlah dokumen laporan hasil analisis kebijakan peningkatan penghasilan PNS	Formulasi Penghitungan: Jumlah dokumen laporan hasil analisis kebijakan peningkatan penghasilan PNS ; Tipe Penghitungan: Non kumulatif; Sumber data: Laporan Asdep V pada Deputi Bidang SDM Aparatur		

Lampiran 4
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor 47 Tahun 2011
 Tanggal 24 Oktober 2011

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	ESS or TI
		3. Persentase tingkat penyusunan Standarisasi Peringkat Jabatan bagi PNS	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah standar peringkat jenis jabatan PNS yang telah tersusun/ Jumlah standar peringkat jenis jabatan PNS yang seharusnya disusun) x 100%; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Laporan Monev Asdep V pada Deputi Bidang SDM Aparatur		
		4. Jumlah instansi pemerintah yang telah melakukan pemeringkatan jabatan	• Formulasi Penghitungan: Jumlah instansi pemerintah yang telah melakukan pemeringkatan jabatan (evaluasi jabatan); • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang SDM Aparatur		
		5. Persentase instansi yang menyusun informasi jabatan dalam rangka penyusunan sistem remunerasi berdasarkan <i>merit system</i>	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah menyusun informasi jabatan dalam rangka penyusunan sistem remunerasi berdasarkan <i>merit system</i>) / (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Laporan Monev Asdep V pada Deputi Bidang SDM Aparatur		

V.

1. Nama Unit Organisasi : **Deputi Bidang Tatalaksana**
2. Tugas : menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana
3. Fungsi :
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara PAN dan RB.

4. Indikator Kinerja Utama Eselon I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
I.	Terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel	1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang ketatalaksanaan	• Formulasi Penghitungan: Jumlah Peraturan Kebijakan di bidang Tata laksana (UU, PP, Perpres, Per. Men. PAN dan RB) yang diterbitkan; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Sekretariat Deputi Bidang Tata Laksana	Deputi Bidang Tata Laksana
		2. Persentase instansi pemerintah pusat yang melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga yang telah melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik) / (Jumlah Kementerian/Lembaga) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil Evaluasi Deputi Bidang Tata laksana	
		3. Persentase instansi pemerintah daerah yang melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Pemda yang telah melakukan penataan ketatalaksanaan dengan baik) / (Jumlah Pemda) x 100% ; • Tipe penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil Evaluasi Deputi Bidang Tata laksana	

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
I	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tata hubungan penyelenggaraan pemerintahan	1.	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang Tata Laksana	• Formulasi Penghitungan : Berdasarkan atas Jumlah Peraturan /Kebijakan bidang tata laksana (UU, PP, Perpres, Per. Men. PAN dan RB) yang diterbitkan ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep I pada Deputi Bidang Tata Laksana	Pengembangan Kebijakan, koordinasi dan Evaluasi Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan	Asisten Deputi Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan
		2	Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan penataan tata hubungan	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian /Lembaga dan Pemda yang melaksanakan tata hubungan) / (Jumlah Kementerian /Lembaga dan Pemda) x 100%; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Asdep I pada Deputi Bidang Tata Laksana		
II	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tata laksana administrasi umum	1.	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang administrasi umum	• Formulasi Penghitungan : Berdasarkan atas Jumlah Peraturan /pedoman di bidang administrasi umum yang diterbitkan ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep II pada Deputi Bidang Tata Laksana	Pengembangan Kebijakan, koordinasi dan Evaluasi Tata Laksana Administrasi Umum	Asisten Deputi Pengembangan Sistem Administrasi Umum Pemerintahan
		2.	Persentase instansi pemerintah yang menerapkan Peraturan/kebijakan /pedoman di bidang administrasi umum	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian /Lembaga dan Pemda yang telah menerapkan Peraturan/kebijakan /pedoman di bidang administrasi umum) / (Jumlah Kementerian /Lembaga dan Pemda) x 100% ;		

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
				• Tipe Penghitungan: Kumulatif; • Sumber data: Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Asdep II pada Deputi Bidang Tata Laksana		
		3.	Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi Peraturan/kebijakan /pedoman di bidang administrasi umum	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian /Lembaga dan Pemda yang diberikan sosialisasi Peraturan/kebijakan /pedoman di bidang administrasi umum) / (Jumlah Kementerian /Lembaga dan Pemda) x 100%; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep II pada Deputi Bidang Tata Laksana		
III	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana aparatur	1.	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang tata laksana sarana dan prasarana kerja aparatur	• Formulasi Penghitungan : Berdasarkan atas Jumlah Peraturan /pedoman di bidang tata laksana sarana dan prasarana kerja aparatur yang diterbitkan ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep III pada Deputi Bidang Tata Laksana	Pengembangan Kebijakan, koordinasi dan Evaluasi Standardisasi Sarana dan Prasarana	Asisten Deputi Standardisasi Sarana dan Prasarana
		2.	Persentase instansi pemerintah yang menerapkan Peraturan/kebijakan /pedoman di bidang tata laksana sarana dan prasarana kerja aparatur	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian /Lembaga dan Pemda yang telah menerapkan Peraturan/kebijakan /pedoman di bidang tata laksana sarana dan prasarana kerja aparatur) / (Jumlah Kementerian /Lembaga dan Pemda) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif;		

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
				Sumber data: Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Asdep III pada Deputi Bidang Tata Laksana		
		3.	Persentase instansi pemerintah yang diberi sosialisasi Peraturan/kebijakan /pedoman di bidang tata laksana sarana dan prasarana kerja aparatur	Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian /Lembaga dan Pemda yang diberikan sosialisasi Peraturan/kebijakan /pedoman di bidang tata laksana sarana dan prasarana kerja aparatur) / (Jumlah Kementerian /Lembaga dan Pemda) x 100%; Tipe Penghitungan: kumulatif ; Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep III pada Deputi Bidang Tata Laksana		
IV	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan prosedur pemerintahan	1.	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang penataan sistem dan prosedur pemerintahan	Formulasi Penghitungan : Berdasarkan atas Jumlah Peraturan /pedoman di bidang penataan sistem dan prosedur pemerintahan yang diterbitkan ; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep IV pada Deputi Bidang Tata Laksana	Pengembangan Kebijakan, koordinasi dan Evaluasi Sistem dan Prosedur Pemerintahan	Asisten Deputi Pengembangan Sistem dan Prosedur Pemerintahan
		2.	Persentase instansi pemerintah yang menerapkan SOP	Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah menerapkan SOP) / (Jumlah Kementerian /Lembaga dan Pemda) x 100%; Tipe Penghitungan : Kumulatif ; Sumber data: Laporan hasil monitoring dan evaluasi Asdep IV pada Deputi Bidang Tata Laksana		

Lampiran 5
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor **47** Tahun 2011
 Tanggal **24** Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
		3.	Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan penataan sistem dan prosedur pemerintahan	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang melaksanakan penataan sistem dan prosedur pemerintahan) / (Jumlah Kementerian /Lembaga dan Pemda) x 100%; • Tipe Penghitungan : Kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil monitoring dan evaluasi Asdep IV pada Deputi Bidang Tata Laksana		
V	Terwujudnya perencanaan pemantauan dan evaluasi program bidang Tata Laksana	1.	Jumlah dokumen perencanaan dan kebijakan yang disusun	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kebijakan yang diterbitkan; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif; • Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep V pada Deputi Bidang Tata Laksana	Koordinasi, pemantauan dan Evaluasi Program Tata Laksana	Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Ketatalaksanaan
		2.	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi ketatalaksanaan pada instansi pemerintah	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif; • Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep V pada Deputi Bidang Tata Laksana;		

VI.

1. Nama Unit Organisasi : **Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur**
2. Tugas : menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur
3. Fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

4. Indikator Kinerja Utama Eselon I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
I.	Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel dan berkinerja tinggi	1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas	Formulasi Penghitungan : Berdasarkan jumlah Peraturan Kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur (UU, PP, Perpres, Per. Men. PAN dan RB) yang diterbitkan Tipe Penghitungan : Non kumulatif Sumber data : Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
		2. Persentase Instansi pemerintah yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai aturan	Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah menerapkan SAKIP sesuai aturan / (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang dievaluasi) x 100% ; Tipe Penghitungan: Kumulatif ; Sumber data: Laporan hasil monev AKIP Asdep IV dan V pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
		3. Persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang akuntabilitas kinerjanya baik / (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang dievaluasi) x 100% ; • Tipe Penghitungan: kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil evaluasi AKIP Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	
		4. Persentase instansi peserta model <i>Island of Integrity</i> yang berhasil	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah Pemda peserta model <i>Island of Integrity</i> yang dinilai berhasil) / (Jumlah instansi pemerintah daerah peserta <i>Island of Integrity</i>) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil monev pelaksanaan program <i>Island of Integrity</i> Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas	
		5. Persentase instansi pemerintah yang menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah memiliki Indikator kineja utama organisasi secara formal) / (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif; • Sumber data : Laporan hasil monev Asdep IV dan V pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	
		6. Persentase LAKIP yang diterima	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah LAKIP Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah diterima / (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data : Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
		7. Persentase PK yang diterima	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah PK Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah diterima) / (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif; • Sumber data : Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	
II.	Terwujudnya penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah yang terintegrasi, efisien dan efektif	1. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai dengan ketentuan	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah melaksanakan SPI sesuai aturan / (Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data : Laporan hasil monev Asdep II pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	
		2. Persentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti dalam waktu satu tahun	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP pada Kementerian/Lembaga yang telah ditindaklanjuti / (Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP pada Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data : Laporan hasil monev Asdep II pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	
		3. Persentase laporan dumas yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang telah disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda) / (Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima Kementerian PAN dan RB) x 100% ; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif ;	

Lampiran 6
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor 47 Tahun 2011
 Tanggal 24 Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
				Sumber data: Laporan monev Asdep III pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	
		4.	Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman	Formulasi Penghitungan : (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang laporan pelaksanaan Inpres percepatan pemberantasan korupsinya telah dievaluasi) / (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda menyampaikan laporan pelaksanaan Inpres percepatan pemberantasan korupsinya) x 100% ; Tipe Penghitungan : Non kumulatif ; Sumber data: Laporan monev Asdep III Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas	

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
I	Meningkatnya efektifitas sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur	1.	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang akuntabilitas kinerja	Formulasi Penghitungan : Berdasarkan Jumlah Peraturan Kebijakan di bidang akuntabilitas kinerja (UU, PP, Perpres, Per. Men. PAN dan RB) yang diterbitkan; Tipe Penghitungan : Non kumulatif ; Sumber data : Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Pengembangan kebijakan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Asisten Deputi Pengembangan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas
		2.	Jumlah pedoman/modul / hasil kajian di bidang akuntabilitas kinerja	Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah pedoman/modul/ hasil kajian bidang akuntabilitas kinerja yang berhasil diterbitkan ; Tipe Penghitungan: Non kumulatif;		

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
				• Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep I pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur		
		3	Jumlah dokumen laporan bidang Pengawasan dan akuntabilitas	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah dokumen laporan bidang pengawasan dan akuntabilitas kinerja yang berhasil diterbitkan ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep I pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur		
II	Meningkatnya Kualitas dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1.	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (UU, PP, Perpres, Per. Men. PAN dan RB) yang diterbitkan	• Formulasi Penghitungan : Berdasarkan Jumlah Peraturan Kebijakan di bidang pengawasan (UU, PP, Perpres, Per. Men. PAN dan RB) yang diterbitkan; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif; • Sumber data : Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, dan Evaluasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	Asisten Deputi Pengembangan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
		2	Persentase APIP yang melaporkan hasil pengawasan	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah APIP Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah melaporkan hasil pengawasan sesuai aturan / (Jumlah APIP Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil monev AKIP Asdep II pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur		

Lampiran 6
Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor **47** Tahun 2011
Tanggal **24** Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
		3	Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan SPI sesuai ketentuan	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah melaksanakan SPI sesuai aturan / (Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100%; • Tipe Penghitungan: Kumulatif; • Sumber data : Laporan hasil monev Asdep II pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur		
		4	Persentase APIP yang telah melaksanakan pemantauan TLHP Fungsional	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah APIP Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah melakukan pemantauan TLHP Fungsional sesuai aturan / (Jumlah APIP Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100%; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil monev TLHP Asdep II pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur		
III	Meningkatnya efektifitas pencegahan korupsi dan pengaduan masyarakat	1.	Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pengawasan (pemberantasan korupsi dan pengawasan masyarakat)	• Formulasi Penghitungan : Berdasarkan Jumlah Peraturan Kebijakan di bidang pengawasan masyarakat (UU, PP, Perpres, Per. Men. PAN dan RB) yang diterbitkan • Tipe Penghitungan : Non kumulatif • Sumber data : Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, dan Evaluasi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi	Asisten Deputi Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi

Lampiran 6
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor 47 Tahun 2011
 Tanggal 24 Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
		2. Persentase instansi pemerintah yang melaksanakan dan melaporkan Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dievaluasi sesuai pedoman	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang laporan pelaksanaan Inpres percepatan pemberantasan korupsinya telah dievaluasi) / (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda menyampaikan laporan pelaksanaan Inpres percepatan pemberantasan korupsinya) x 100%; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan monev Asdep III pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur		
		4. Persentase laporan dumas yang disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang telah disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda)/ (Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima Kementerian PAN dan RB) x 100% : • Tipe Penghitungan : Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan monev Asdep III pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur		
		5. Persentase instansi peserta model Island of Integrity yang berhasil	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah Pemda peserta model <i>Island of Integrity</i> yang dinilai berhasil) / (Jumlah instansi pemerintah daerah peserta <i>Island of Integrity</i>) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ;		

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
				Sumber data: Laporan Hasil Monev pelaksanaan program Island of Integrity Asdep III pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur		
IV.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur Pemerintah pusat	1.	Penerbitan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKJPP)	Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKJPP) yang diterbitkan dan disampaikan pada Kementerian Keuangan ; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan kegiatan Asdep IV pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat	Asisten Deputi Pemantauan dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat
		2.	Persentase instansi pemerintah pusat yang akuntabilitas kerjanya baik	Formulasi Penghitungan : (Jumlah Kementerian/Lembaga yang akuntabilitas kerjanya baik) / (Jumlah Kementerian/Lembaga yang dievaluasi) x 100%; Tipe Penghitungan: Kumulatif ; Sumber data: Laporan hasil evaluasi AKIP Kementerian/Lembaga Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur		
		3	Persentase instansi pemerintah pusat yang menyusun IKU	Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga yang telah memiliki Indikator kineja utama organisasi secara formal / (Jumlah Kementerian/Lembaga) x 100% ; Tipe Penghitungan: Kumulatif;		

Lampiran 6
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor 47 Tahun 2011
 Tanggal 24 Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
				• Sumber data : Laporan monev Asdep IV pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur		
		4	Persentase LAKIP Pusat yang diterima	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah LAKIP Pusat Kementerian/Lembaga yang telah diterima / (Jumlah Kementerian/Lembaga) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data : Laporan monev Asdep IV pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur		
		5	Persentase PK instansi pemerintah pusat yang diterima	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah PK Instansi pemerintah pusat yang telah diterima) / (Jumlah Kementerian/Lembaga) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data : Laporan monev Asdep IV pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur		
V.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur Pemerintah daerah	1.	Persentase instansi yang menerapkan sistem akuntabilitas kinerja	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Pemda Prov, Kab, Kota yang telah menerapkan SAKIP sesuai aturan / (Jumlah Pemda yang dievaluasi) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil monev Asdep V pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Asisten Deputi Pemantauan dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Lampiran 6
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor **47** Tahun 2011
 Tanggal **29** Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
		3. Persentase instansi yang menyusun IKU	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Pemda Prov, Kab, Kota yang telah memiliki Indikator kinerja utama organisasi secara formal / (Jumlah Pemda) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Kumulatif ; • Sumber data : Laporan hasil monev Asdep V pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur		
		4. Persentase LAKIP yang diterima	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah LAKIP Pemda Prov, Kab, Kota yang telah diterima / (Jumlah Pemda) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data : Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur		
		5. Persentase PK yang diterima	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah PK Pemda Prov, Kab, Kota yang telah diterima) / (Jumlah Pemda Prov, Kab, Kota) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif • Sumber data : Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur		

VII.

1. Nama unit Organisasi : **Deputi Bidang Pelayanan Publik**
2. Tugas : menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik
3. Fungsi :
 - a. penyiapan dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik;
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pelayanan publik; dan
 - d. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. Indikator Kinerja Utama Eselon I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penghitungan	Eselon
I.	Terwujudnya kualitas pelayanan publik prima, cepat, pasti, murah, transparan, adil, patut dan memuaskan	1. Jumlah peraturan/kebijakan di bidang pelayanan publik	Formulasi Penghitungan : Berdasarkan Jumlah Peraturan Kebijakan di bidang pelayanan publik (UU, PP, Perpres, Per. Men. PAN dan RB) yang diterbitkan Tipe Penghitungan : non kumulatif Sumber data : Sekretariat Deputi Bidang pelayanan publik	Deputi Bidang Pelayanan Publik
		2. Persentase Instansi yang skor IKM baik	Formulasi Penghitungan: (Jumlah instansi yang skor IKM baik) / (Jumlah instansi yang memiliki IKM) x 100% ; Tipe Penghitungan: kumulatif ; Sumber data: Laporan hasil penilaian pelayanan publik Deputi Bidang pelayanan publik	
		3. Persentase Pemerintah Daerah yang menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Formulasi Penghitungan : (Jumlah Prov/Kab/Kota yang telah menerapkan PTSP) / (Jumlah Prov/Kab/Kota) x 100% ; Tipe Penghitungan: kumulatif ; Sumber data: Laporan hasil penilaian pelayanan publik Deputi pelayanan publik	

Lampiran 7
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor **47** Tahun 2011
 Tanggal **24** Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Asas
		4. Persentase instansi yang berkategori baik sesuai penilaian	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah instansi yang berkategori baik)/(Jumlah instansi yang dinilai) x 100% ; • Tipe Penghitungan: kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil penilaian pelayanan publik Deputy Bidang pelayanan publik	
		5. Persentase unit pelayanan yang berkategori baik sesuai penilaian	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah unit pelayanan berkategori baik) / (Jumlah instansi yang dinilai) x 100% ; • Tipe Penghitungan: kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil penilaian pelayanan publik Deputy Bidang Pelayanan Publik	
		6. Jumlah instansi yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan instansi yang telah menerapkan pedoman pelayanan berbasis partisipasi masyarakat ; • Tipe Penghitungan: kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil monev Deputy Bidang pelayanan publik	
		7. Jumlah instansi yang menerapkan UU Nomor 25/2009 tentang pelayanan publik	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan instansi yang telah menerapkan UU Nomor 25/2009 ; • Tipe Penghitungan: kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil monev Deputy Bidang pelayanan publik	

Lampiran 7
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor **47** Tahun 2011
 Tanggal **24** Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
		8. Jumlah Pemda yang melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang diakui secara internasional	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah Pemda yang melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang diakui secara Internasional ; • Tipe Penghitungan: kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil monev Deputi Bidang pelayanan publik	

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
I	Meningkatnya dukungan program peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Persentase Pemerintah Daerah yang diberi sosialisasi UU tentang pelayanan publik	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah Pemerintah Daerah yang telah disosialisasi UU Pelayanan Publik) / (Jumlah Provinsi) x 100%; • Tipe Penghitungan: non kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep I pada Deputi Bidang Pelayanan Publik	Pengembangan Kebijakan dan Evaluasi Program Pelayanan Publik	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik
		2. Persentase Instansi Pusat yang diberi sosialisasi UU tentang pelayanan publik	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah Kementerian/Lembaga yang telah disosialisasi UU Pelayanan Publik) / (Jumlah Kementerian/Lembaga Non Kementerian) x 100% ; • Tipe Penghitungan: non kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep I pada Deputi Bidang Pelayanan Publik		

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon
		3.	Persentase Instansi Pemerintah yang telah mengimplementasikan UU No.25/2009 tentang pelayanan publik	• Formulasi Penghitungan (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah mengimplementasikan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik) / (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ; • Tipe Penghitungan: kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep I pada Deputi Bidang Pelayanan Publik		
II.	Meningkatnya perbaikan sistem pelayanan dan penerapan standar pelayanan publik	1.	Jumlah unit pelayanan instansi yang menerapkan standar pelayanan sesuai UU 25/2009	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah unit pelayanan yang menjadi model uji coba ; • Tipe Penghitungan: kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep II pada Deputi Bidang Pelayanan Publik	Pengembangan Sistem dan Standarisasi Pelayanan Publik	Asisten Deputi Pengembangan dan Standardisasi Pelayanan
		2.	Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan instansi/pemerintah daerah	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah unit pelayanan yang dinilai berdasarkan usulan instansi/daerah ; • Tipe Penghitungan: kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep II pada Deputi Bidang Pelayanan Publik		
		3.	Persentase unit pelayanan yang berkategori baik sesuai penilaian	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah unit pelayanan yang berkategori baik) / (Jumlah unit pelayanan yang dinilai) x 100% ; • Tipe Penghitungan: kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil penilaian pelayanan publik Asdep II pada Deputi Bidang Pelayanan Publik		

Lampiran 7
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor 47 Tahun 2011
 Tanggal 24 Oktober 2011

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
		4. Persentase instansi yang berkategori baik sesuai penilaian	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah instansi yang berkategori baik) / (Jumlah instansi yang dinilai) x 100% ; • Tipe Penghitungan: kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil penilaian pelayanan publik Asdep II pada Deputi Bidang Pelayanan Publik		
III	Terlaksananya penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan publik di bidang ekonomi dan bisnis	1. Jumlah <i>help-desk</i> pada Provinsi	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah <i>help-desk</i> yang dilakukan pada Provinsi • Tipe Penghitungan : non kumulatif; • Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep III pada Deputi Bidang Pelayanan Publik	Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik di Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pelayanan Perekonomian
		2. Jumlah kasus yang diselesaikan	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan jumlah kasus pelayanan publik berskala strategis yang telah berhasil diselesaikan; • Tipe Penghitungan: non kumulatif; • Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep III pada Deputi Bidang Pelayanan Publik		
		3. Persentase Pemda yang menerapkan OSS/PTSP	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Pemda yang telah menerapkan OSS/PTSP dalam pelayanan) / (Jumlah Pemda) x 100% ; • Tipe Penghitungan: kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil monev Asdep III pada Deputi Bidang Pelayanan Publik		

Lampiran 7
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor **47** Tahun 2011
 Tanggal **24** Oktober 2011

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
IV.	Terlaksananya penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial	1. Jumlah kabupaten/kota yang mempresentasikan kepuasan pelanggan berdasarkan IKM	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan survei IKM pada unit-unit pelayanan publik; • Tipe Penghitungan: non kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil movev Asdep IV pada Deputi Bidang Pelayanan Publik	Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik di Bidang Kesejahteraan Sosial	Asisten Deputi Pelayanan Kesejahteraan Sosial
		2. Skor IKM Unit Pelayanan	• Formulasi Penghitungan: Rata-rata Skor IKM unit pelayanan Publik secara nasional pada tahun berjalan ; • Tipe Penghitungan: non kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil penilaian pelayanan publik Deputi Bidang Pelayanan Publik		
		3. Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan evaluasi dampak Pemberian Penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN)	• Formulasi Penghitungan: Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi dampak Pemberian Penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) ; • Tipe Penghitungan: non kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep IV pada Deputi Bidang Pelayanan Publik		
V.	Terlaksananya penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan publik di bidang pemerintahan umum, hukum dan keamanan	1. Jumlah Kab/Kota yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat.	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan jumlah Kab/Kota yang telah menerapkan pedoman pelayanan berbasis partisipasi masyarakat ; • Tipe Penghitungan: kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil movev Asdep V pada Deputi Bidang Pelayanan Publik	Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan	Asisten Deputi Pelayanan Pemerintahan Umum, Hukum dan Keamanan

Lampiran 7
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor 47 Tahun 2011
 Tanggal 24 Oktober 2011

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
		2. Jumlah unit pelayanan publik yang menerapkan pedoman peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat	• Formulasi Penghitungan: Jumlah unit pelayanan yang telah menerapkan pedoman pelayanan berbasis partisipasi masyarakat ; • Tipe Penghitungan: kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil money Asdep V pada Deputi Bidang Pelayanan Publik		
		3. Jumlah Pemda/Instansi yang dinilai berdasarkan usulan instansi/pemerintah provinsi	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah Pemda/instansi yang dinilai berdasarkan usulan instansi/provinsi ; • Tipe Penghitungan: kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep V pada Deputi Bidang Pelayanan Publik		
		4. Jumlah Pemda yang melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang diakui secara internasional	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah Pemda yang melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang diakui secara internasional ; • Tipe Penghitungan: kumulatif ; • Sumber data: Laporan hasil money Asdep V pada Deputi Bidang pelayanan publik		

VIII.

1. Nama Unit Organisasi : **Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**
2. Tugas : melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PAN dan RB.
3. Fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan Kementerian PAN dan RB;
 - b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian PAN dan RB;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian PAN dan RB;
 - d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
 - e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. Indikator Kinerja Utama Eselon I

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
I.	Terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian	1.	Persentase dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu)/ (Jumlah dokumen administrasi keuangan) x100% ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Umum	Sekretaris Kementerian
		2.	Persentase barang milik negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah barang milik negara yang telah tercatat sesuai SAP)/ Jumlah barang milik negara Kementerian PAN dan RB) x100% ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Umum	

Lampiran 8
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor 47 Tahun 2011
 Tanggal 24 Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
		3. Opini BPK terhadap laporan keuangan KemPAN dan RB	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Kategori opini BPK terhadap hasil audit atas laporan keuangan KemPAN dan RB ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Umum	
		4. Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah pejabat yang telah melaporkan LHKPN)/ (Jumlah pejabat Kementerian PAN dan RB yang wajib menyampaikan LHKPN) x 100%; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Umum	
		5. Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia) / (Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standard) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Umum	
		6. Persentase dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu)/ (Jumlah dokumen program dan anggaran) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Perencanaan	
		7. Persentase dokumen pelaporan yang diselesaikan tepat waktu	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah dokumen pelaporan diselesaikan tepat waktu)/ (jumlah dokumen pelaporan) x100% ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Perencanaan	

Lampiran 8
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor **47** Tahun 2011
 Tanggal **24** Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
		8. Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan)/ (jumlah kegiatan yang direncanakan dalam dokumen) x100% ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Perencanaan	
		9. Persentase publikasi/ pemberitaan tentang kebijakan PAN yang dilaksanakan	• Formulasi Penghitungan:(Jumlah publikasi tentang kebijakan PAN dan RB yang dilakukan)/ (Jumlah kebijakan PAN dan RB) x100% ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Hukum dan Humas	
		10. Persentase proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai prosedur	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan jumlah peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai prosedur) / (jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan) ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Biro hukum dan Humas	

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
I.	Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan pelayanan perkantoran, keuangan dan kepegawaian	1. Persentase dokumen administrasi yang diselesaikan tepat waktu (perkantoran, kepegawaian, keuangan)	Formulasi Penghitungan: (Jumlah dokumen administrasi perkantoran yang diselesaikan tepat waktu) / (Jumlah dokumen administrasi perkantoran yang harus diselesaikan) x 100%; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Umum	Pembinaan dan Pelayanan Perkantoran, Keuangan dan Kepegawaian	Biro Umum
		2. Persentase pegawai Kementerian Negara PAN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan kursus lainnya	Formulasi Penghitungan: (Jumlah pegawai Kementerian Negara PAN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan kursus lainnya) / (Jumlah pegawai Kementerian PAN dan RB) ; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Umum		
		3. Persentase barang milik negara yang tercatat/ terinventarisasi sesuai kaidah pencatatan BMN	Formulasi Penghitungan: (Jumlah barang milik negara yang telah tercatat sesuai SAP) / (Jumlah barang milik negara Kementerian PAN dan RB) x 100% ; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Umum		
		4. Persentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN	Formulasi Penghitungan: (Jumlah pejabat yang telah melaporkan LHKPN)/ (Jumlah pejabat Kementerian PAN dan RB yang wajib menyampaikan LHKPN) x100% ;		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
			Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Umum		
		5. Persentase pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan	Formulasi Penghitungan: (Jumlah pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan) / (Jumlah pengadaan barang dan jasa) x 100% ; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Umum		
		6. Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas pelayanan yang baik	Formulasi Penghitungan: (Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia) / (Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standard) x 100% ; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Umum		
II.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan internal Perencanaan/ Penganggaran, kerjasama, pengembangan sistem dan penyusunan laporan kebijakan PAN	1. Persentase dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu	Formulasi Penghitungan: (Jumlah dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu)/ (jumlah dokumen program dan anggaran) x 100% ; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Perencanaan	Pembinaan dan Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, kerjasama lembaga dan pelaporan	Biro Perencanaan

Lampiran 8
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor 47 Tahun 2011
 Tanggal 24 Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
		2. Persentase dokumen pemantauan dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu) / (Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi) x 100%; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Perencanaan		
		3. Persentase dokumen bahan kebijakan yang diselesaikan tepat waktu	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah dokumen bahan kebijakan yang diselesaikan tepat waktu) / (Jumlah dokumen bahan kebijakan) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Perencanaan		
		4. Persentase dokumen pelaporan yang diselesaikan tepat waktu	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah dokumen pelaporan yang diselesaikan tepat waktu) / (Jumlah dokumen pelaporan) x 100%; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif; • Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Perencanaan		
		5. Persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan) / (Jumlah kegiatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan) x 100% ;		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
			Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Perencanaan		
		6. Jumlah kerjasama bilateral maupun multilateral yang dilaksanakan	Formulasi Penghitungan: Berdasarkan jumlah MOU kerjasama bilateral dan multilateral yang telah dilaksanakan ; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Perencanaan		
III	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan hukum, kehumasan dan pencitraan lembaga	1. Persentase dokumen kehumasan yang diselesaikan tepat waktu	Formulasi Penghitungan: (Jumlah dokumen kehumasan yang diselesaikan tepat waktu) / (Jumlah dokumen kehumasan yang ada x 100% ; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Hukum dan Humas	Pengelolaan dan Pembinaan Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pencitraan Lembaga	Biro Hukum dan Humas
		2. Persentase publikasi/ pemberitaan tentang kebijakan PAN dan RB yang dilaksanakan	Formulasi Penghitungan: (Jumlah publikasi tentang kebijakan PAN dan RB yang dilakukan) / (Jumlah kebijakan PAN dan RB) x 100% ; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Hukum dan Humas		
		3. Persentase penyelesaian pengembangan sistem informasi yang dilaksanakan	Formulasi Penghitungan: (Jumlah pengembangan sistem informasi yang dilaksanakan) / (Jumlah pengembangan sistem informasi yang direncanakan) x 100% ;		

Lampiran 8
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor 47 Tahun 2011
 Tanggal 24 Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
			• Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Hukum dan Humas		
		4. Persentase penyiapan sistem <i>e-procurement</i>	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah pengembangan sistem <i>e-procurement</i> yang dilaksanakan) / (Jumlah pengembangan sistem <i>e-procurement</i> yang direncanakan) x 100 %; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Hukum dan Humas		
		5. Persentase proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai prosedur	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan sesuai prosedur) / (Jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan) x 100% ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Hukum dan Humas		
		6. Persentase Pemberian pertimbangan teknis penyusunan Peraturan/Kep/SE Men. PAN dan RB	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah Peraturan/Kep/SE Men. PAN dan RB yang dimintakan pertimbangan / (jumlah Peraturan/Kep/SE Men. PAN dan RB yang direncanakan) x 100%; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Hukum dan Humas		

Lampiran 8
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor **47** Tahun 2011
 Tanggal **24** Oktober 2011

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon/II
		7. Persentase dokumen peraturan perundang-undangan dan buku perpustakaan yang dapat dikumpulkan/dihimpun	• Formulasi Penghitungan: (Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan dan buku perpustakaan yang dapat dikumpulkan/dihimpun / (jumlah dokumen peraturan perundang-undangan dan buku perpustakaan yang direncanakan) ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Hukum dan Humas		

IX

1. Nama Unit Organisasi :
 1. Staf Ahli Bidang Hukum;
 2. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
 3. Staf Ahli Bidang Sistem Manajemen;
 4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
 5. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur.
2. Tugas : memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai masalah hukum, masalah kebijakan publik, masalah Sistem Manajemen, masalah Otonomi Daerah, dan masalah Budaya Kerja Aparatur

3. Indikator Kinerja Utama Eselon I

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon I
I.	Terwujudnya Dukungan Perumusan Kebijakan PAN dan RB	1.	Persentase laporan dukungan perumusan kebijakan bidang hukum	Formulasi Penghitungan: (jumlah laporan perumusan kebijakan bidang hukum telah diselesaikan/ jumlah laporan perumusan kebijakan bidang hukum yang seharusnya diselesaikan) x100%; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Kegiatan Staf Ahli Bidang Hukum	Pelaksanaan Dukungan Kebijakan PAN dan RB	Staf Ahli Kementerian
		2.	Terlaksananya kampanye Budaya Kerja Aparatur melalui <i>Workshop</i>	Formulasi Penghitungan : Jumlah Workshop Budaya Kerja yang dilaksanakan; Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Sumber data: Laporan Kegiatan Staf Ahli Bidang Budaya Kerja		

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon I
		3.	Jumlah instansi Pemerintah yang dievaluasi pelaksanaan <i>Pilot Project</i> Pengembangan Budaya Kerja Aparatur	• Formulasi Penghitungan : Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah dievaluasi pelaksanaan <i>Pilot Project</i> Pengembangan Budaya Kerja Aparatur; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Staf Ahli Bidang Budaya Kerja		
		4.	Persentase laporan telaahan dukungan penyelesaian permasalahan bidang sistem manajemen	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah laporan telaahan penyelesaian permasalahan bidang sistem manajemen yang telah diselesaikan) / (Jumlah laporan telaahan penyelesaian permasalahan bidang sistem manajemen yang seharusnya diselesaikan) x 100%; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Staf Ahli Bidang Sistem Manajemen		
		5.	Persentase laporan dukungan perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan Otonomi Daerah	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah laporan telaahan perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang telah diselesaikan/ jumlah laporan telaahan perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah yang seharusnya diselesaikan) x 100%;		

Lampiran 9
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi
 Nomor **47** Tahun 2011
 Tanggal **24** Agustus 2011

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon I
				• Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
		6.	Persentase laporan dukungan perumusan kebijakan bidang Kebijakan Publik	• Formulasi Penghitungan : (Jumlah laporan telaahan perumusan kebijakan bidang kebijakan publik yang telah diselesaikan/ jumlah laporan telaahan perumusan kebijakan bidang kebijakan publik yang seharusnya diselesaikan) x 100%; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data: Laporan Kegiatan Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik		

X.

1. Nama Unit Organisasi : **Inspektorat Kementerian**
2. Tugas : melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian PAN dan RB.
3. Fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
 - b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kementerian.

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
I.	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan intern pelaksanaan tugas kementerian	1. Jumlah unit kerja yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah unit kerja yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam PK ; • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif ; • Sumber data : Laporan hasil evaluasi kinerja Inspektorat Kementerian	Pembinaan dan Pengawasan Intern dan <i>Quality Assurance</i>	Inspektorat Kementerian
		2. Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi hasil evaluasi AKIP ; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif ; • Sumber data : Laporan hasil evaluasi AKIP Kementerian		
		3. Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B hasil evaluasi kinerja Inspektorat ;		

X.

1. Nama Unit Organisasi : **Inspektorat Kementerian**
2. Tugas : melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian PAN dan RB.
3. Fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
 - b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kementerian.

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
I.	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan intern pelaksanaan tugas kementerian	1. Jumlah unit kerja yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah unit kerja yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam PK ; • Tipe Penghitungan: Non Kumulatif ; • Sumber data : Laporan hasil evaluasi kinerja Inspektorat Kementerian	Pembinaan dan Pengawasan Intern dan <i>Quality Assurance</i>	Inspektorat Kementerian
		2. Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi hasil evaluasi AKIP ; • Tipe Penghitungan : Non kumulatif ; • Sumber data : Laporan hasil evaluasi AKIP Kementerian		

Lampiran 10
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor 47 Tahun 2011
 Tanggal 24 Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
			• Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data : Laporan hasil evaluasi kinerja Inspektorat Kementerian		
		4. Opini BPK-RI	• Formulasi Penghitungan : Berdasarkan Kategori opini BPK-RI terhadap hasil audit atas laporan keuangan Kementerian ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data : Laporan hasil audit keuangan BPK-RI		
		5. Jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material berdasarkan laporan hasil audit BPK-RI ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data : Laporan evaluasi hasil audit BPK-RI		
		6. Jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material	• Formulasi Penghitungan : Berdasarkan Jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material berdasarkan laporan hasil audit BPK-RI; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data : Laporan hasil audit keuangan BPK-RI		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
		3. Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah unit kerja yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B hasil evaluasi kinerja Inspektorat ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data : Laporan hasil evaluasi kinerja Inspektorat Kementerian		
		4. Opini BPK-RI	• Formulasi Penghitungan : Berdasarkan Kategori opini BPK-RI terhadap hasil audit atas laporan keuangan Kementerian ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data : Laporan hasil audit keuangan BPK-RI		
		5. Jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	• Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material berdasarkan laporan hasil audit BPK-RI ; • Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data : Laporan evaluasi hasil audit BPK-RI		
		6. Jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material	• Formulasi Penghitungan : Berdasarkan Jumlah unit kerja yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material berdasarkan laporan hasil audit BPK-RI;		

Lampiran 10
 Peraturan Menteri Negara
 Pendayagunaan Aparatur Negara
 dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
 Nomor **47** Tahun 2011
 Tanggal **24** Oktober 2011

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
			• Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; • Sumber data : Laporan hasil audit keuangan BPK-RJ		

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal...~~24~~Oktober 2011

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



[Signature]
AZWAR ABUBAKAR